



## Politik Pendidikan Islam Berbasis Multikultural: Konsep dan Strategi Pembelajaran Agama Islam dalam Mewujudkan Islam Rahmatan Li Al- 'Ālamīn

*Samsul Munir*

syanicha@gmail.com

(Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam  
Pangeran Diponegoro Nganjuk)

**Abstract:** A sign showing national values degradation is reflected from the escalating conflicts occurring, triggered by issue related to ethnicity, religion, and political party, since a couple of years ago. What is happening is not in line with what the founding fathers of this nation put to unite all people in Indonesia, 'Bhineka Tunggal Ika' (unity in diversity), a symbol they put in the national emblem of Indonesia. The symbol represents the existence of this country. It is meant to create national life order which consists of united diversity. To keep the founding fathers' dream alive, any issue intended to divide the country and break the harmony of united diversity should be carefully watched and handled. It also has to be completely solved involving all parties and also education. Islam as

the majority and the religion with the most education institution in the country, which is also claimed to be the peaceful religion, has great challenge in implementing its *kaffa* (complete) teaching. The history of Islam cannot be detached from Islamic education. Making Islamic education as one way of developing people to deal with the dividing country issues, national values degradation and eroded morality problems is a definite. Making multicultural Islamic education as the main base for developing Indonesians moral and spirituality is essential due to the fact that majority of Indonesians are Muslims and that Indonesia is multicultural country.

Keywords: *politic of Islamic education, teaching strategy, multiculturalism*

**Abstrak:** Degradasi nilai-nilai kebangsaan yang menjadi semangat nasionalisme, dengan ditandai munculnya isu-isu sara, adat, ras, agama dan politik dalam kubangan konflik seperti yang terjadi sekarang ini menunjukkan bahwa hal ini masih sangat jauh dari harapan para *founding father* bangsa yang meletakkan “Bhineka Tunggal Ika” sebagai simbol dalam lambang negara Indonesia. Peletakan simbol yang menjadi representasi keberadaan bangsa ini, memiliki arti terwujudnya suatu tatanan hidup berbangsa yang terdiri dari keanekaragaman dalam kebersatuan. Isu-isu yang dapat memecah belah keharmonisan hidup berbangsa pada masyarakat Indonesia yang beragam di era globalisasi sekarang ini memang sangat perlu untuk diperhatikan dan sekaligus dicarikan formulasinya melalui pendidikan dalam rangka mewujudkan harapan para pendiri bangsa tersebut. Islam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia yang di dalamnya terkait erat dengan pendidikan sesungguhnya mempunyai tantangan luar biasa hebatnya dalam mengimplementasikan ajaran-ajaran yang oleh pemeluknya diklaim sebagai agama yang bernilai *rahmatan li al-‘alamīn*. Islam sebagai agama yang ajaran-ajarannya bersifat *kaffah* dengan begitu dalam setiap peradaban yang dilalui oleh umat Islam, nyaris eksistensinya juga tidak bisa terlepas dengan pendidikannya. Menjadikan pendidikan Islam sebagai suatu proses pembangunan masyarakat dalam menyikapi isu-isu yang dapat memecah belah bangsa, penurunan nilai-nilai kebangsaan dan persoalan moralitas masyarakat yang terkikis oleh globalisasi menjadi suatu keniscayaan untuk mewujudkan keanekaragaman dalam bingkai kebersatuan.

Menjadikan pendidikan Islam multikultural sebagai basis utama pembangunan moral dan spiritual di Indonesia menjadi strategis dengan mengingat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang penduduknya mayoritas Muslim dan kondisi fisiknya yang beragam kultur.

Kata Kunci: *Politik Pendidikan Islam, Strategi pembelajaran, Multikulturalisme*

## Pendahuluan

Indonesia dalam sejarah dunia termasuk di antara bilangan negara yang diberkati. Sebutan ini bukan tanpa alasan, akan tetapi dengan mengingat bahwa kekayaan yang terkandung di dalamnya memang sangat luar biasa. Kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia tidak hanya terletak pada keanekaragaman sumber daya alamnya saja, namun demikian juga terdapat pada nilai-nilai budayanya yang *adiluhung*.<sup>1</sup> Julukan atau sebutan yang terasa manis itu nampaknya 'hampir' menjadi kenangan saja, karena ditemukannya fakta yang menunjukkan bahwa dalam dekade terakhir ini, bangsa Indonesia mulai kehilangan identitas akan keanekaragaman yang telah menjadi dasar pengakuannya. Parameter yang dapat digunakan di sini misalnya adalah terjadinya banyak konflik pada masyarakatnya yang dipicu oleh isu-isu yang berlabel suku, adat, ras, dan agama.<sup>2</sup>

---

1 Secara fisik, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki 17.548 pulau besar dan kecil –baik yang dihuni maupun tidak–, 3,5 juta km<sup>2</sup> laut, 80.000 km<sup>2</sup> pantai, 135 gunung berapi yang di dalamnya terkandung kekayaan mineral, hutan tropis, dan rumah tradisional. Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 250 juta dengan menggunakan 525 bahasa dan dialek sebagai alat komunikasi untuk kepentingan lokal. Lih. Mujamil Qomar, *Fajar Baru Islam Indonesia?: Kajian Komprehensif atas Arah Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara*, (Bandung: Mizan, 2012), hlm. 5-7.

2 Beberapa konflik seperti ini dapat dicontohkan dengan terjadinya penyerangan terhadap kelompok Satariah Sahid di Deli Medan, penyerangan terhadap fasilitas masjid dan pesantren Darusy Syifa' di Lombok Timur, bentrokan antara Majelis Mujahidin Indonesia dan umat Islam di Lombok Timur, bentrokan antara anggota Laskar Umat Islam (LUI) dan warga di Solo, pengusiran warga terhadap tokoh aliran salafi di Lombok Barat. Lih. Zainal Abidin Bagir, dkk., *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008*, (Yogyakarta: CRCs-UGM, 2008), hlm. 13. Pada sebuah tabel khusus dalam laporan ini (halaman 18-20) juga disebutkan beberapa konflik yang telah terjadi di seputar keberadaan rumah ibadah. Beberapa kasus seputar rumah ibadah tahun 2013 sebagaimana

Pada banyak tempat, anak-anak sebagai generasi penerus bangsa seakan lebih giat melakukan penggalangan tindak kekerasan dengan mengatasnamakan agama, ras, suku dan perbedaan golongan. Agama seringkali dipertontonkan sebagai pemicu kekerasan dan berbagai instabilitas, sehingga agama atau apa pun yang dilekatkan kepadanya seakan terkesan buruk, primordial, fanatis, picik, dan seolah berwajah monster yang berpotensi sebagai perusak.<sup>3</sup> Intrik politik dengan menggunakan isu sektarian dalam konflik horizontal antar penganut aliran agama di Indonesia juga masih sering menjadi pemicu. Dalam hal ini misalkan dapat dicontohkan konflik Sunni-Syiah di Sampang, yang menjadi kompleks ketika terjadi politisasi atau keterlibatan aktor politik di dalamnya –secara bersamaan, ketika itu konstalasi politik telah mulai menghangat dengan akan digelarnya Pilkada Jatim–. Sebagaimana laporan penelitian yang dirilis oleh CRCS-UGM, dalam kasus ini terlihat secara jelas hubungan *mutual symbiosis* antara para Kiai dan para politisi dalam mencapai kepentingan mereka. Para Kiai Sunni mempunyai “hajat” untuk mengusir Tajul dan membubarkan ajarannya di tanah Madura, serta mengembalikan pengikutnya kepada ajaran *ahlussunnah waljamā’ah*. Pada sisi lain, para politisi juga mempunyai kepentingan dengan para kiai yang memiliki massa militan di kalangan akar rumput yang bermanfaat sebagai lumbung suara ketika pesta demokrasi dihelat.

Pada kasus yang terjadi di Bekasi, politik (Pilkada) memang tidak dapat dilihat sebagai sebab terjadinya penutupan paksa Gereja HKBP Filadelfia dan Masjid Al-Misbah Ahmadiyah karena hal ini sudah terjadi sejak lama sebelum pemilihan umum itu digelar. Meski demikian, dalam kasus ini momen Pilkada telah terbukti mampu menciptakan aliansi-aliansi dan mobilisasi politik yang berujung pada penutupan paksa kedua

---

dilaporkan oleh Kementerian Agama RI 2014, diketahui bahwa persoalan rumah ibadat di sejumlah daerah ternyata mempunyai ragam latar belakang yang unik dan respon yang beragam. Jika diamati, kasus menimpa rumah ibadat juga bukan semata-mata atas alasan keagamaan. Lihat jauh tentang laporan ini dapat dilihat dalam, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2013*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014), hlm. 25.

3 Imam Suprayogo, *Paradigma Pengembangan Keilmuan di Perguruan Tinggi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), hlm. 1.

tempat ibadah tersebut. Dalam kasus ini, muncul regulasi yang dikeluarkan oleh aktor-aktor politik yang mempunyai kepentingan elektoral. Korelasi ini nampak dari kesan koordinasi antara aksi massa penentang dengan keluarnya regulasi penutupan rumah ibadah. Aksi yang dilakukan oleh FPI untuk menentang masjid Al-Misbah mempunyai kaitan dengan lahirnya Perwal tentang penutupan masjid Ahmadiyah.<sup>4</sup>

Walaupun konflik sebagai parameter yang digunakan di atas mungkin saja masih terlalu dini dan perlu sekali untuk dilakukan analisis lebih lanjut dalam hubungannya dengan *degradasi* nilai-nilai kebangsaan yang menjadi semangat nasionalisme, namun dengan munculnya isu-isu sara, adat, ras, agama dan politik dalam kubangan konflik tersebut menunjukkan bahwa hal ini masih sangat jauh dari harapan para *founding father* bangsa yang meletakkan “Bhineka Tunggal Ika” sebagai simbol dalam lambang negara Indonesia yang memiliki arti terwujudnya suatu tatanan hidup berbangsa yang terdiri dari keanekaragaman dalam kebersatuan.

Dengan melihat isu-isu yang dapat memecah belah keharmonisan hidup berbangsa tersebut, Islam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia sesungguhnya mempunyai tantangan luar biasa hebatnya dalam mengimplementasikan ajaran-ajaran yang oleh pemeluknya diklaim sebagai agama yang bernilai *rahmatan li al-‘ālamīn*. Islam sebagai agama yang ajaran-ajarannya bersifat *kaffah* –tidak hanya mengatur persoalan akhirat saja, tetapi setiap sendi dari kehidupan dunia ini walaupun tidak secara eksplisit juga dijelaskan dalam sumber pokoknya– di dalamnya terkait erat dengan pendidikan.<sup>5</sup> Sehingga dengan begitu dalam setiap peradaban yang dilalui oleh umat Islam, maka nyaris eksistensi daripada

---

4 Muhammad Iqbal Ahnaf, dkk., *Politik Lokal dan Konflik Keagamaan; Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik dalam Konflik Keagamaan di Sampang, Bekasi, dan Kupang*, (Yogyakarta: CRCS-UGM, 2015), hlm. 33.

5 Diantara ayat al-Qur’an yang memberikan penjelasan tentang pendidikan dan predikat bagi orang yang berilmu misalnya dalam QS. At-Taubah: 122, QS. Az-Zumar: 9, QS. Al-Mujādilah: 11, QS. An-Nahl: 125, QS. Thahā: 114. Dalam banyak hadits, Nabi juga menyinggung akan pentingnya pendidikan bagi seorang muslim hingga beliau bersabda “*Ballighū ‘anni walaw āyatan .....*” (HR. Bukhārī), “*Wa man salaka ṭarīqan yaltamisu fīhi ‘ilman sahhala lahu bihi ṭarīqan ilal jannah*” (HR. Muslim). Lihat hadits ini dalam Riyādlus Ṣālihīn no. 1380-1381, Muhyiddīn Abu Zakariyā Yahya Al-Nawawī, *Riyādlus Ṣālihīn*, (Solo: Insan Kamil, 2013), hlm. 602.

ajaran (baca: pendidikan) Islam ini juga tidak bisa terlepas daripada tugas dan tanggungjawabnya dalam memberikan jawaban atas tantangan dan peluang yang secara bersamaan muncul di era globalisasi seperti sekarang ini.

Dalam konteks demikian ini, seperti dikemukakan oleh Suprayogo, maka menjadikan agama sebagai basis pembangunan dalam menyelesaikan persoalan moral dan spiritual di Indonesia sekaligus sebagai basis pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan merupakan suatu keniscayaan. Sesuai dengan karakter daripada masyarakat modern, pendidikan Islam dalam menghadapi dunia yang semakin bersifat global, lebih terbuka, rasional dan penuh persaingan tidak cukup hanya menawarkan simbol atau sebatas label tanpa makna yang sesuai dengan tuntunan hidup mereka.<sup>6</sup> Pendidikan Islam secara khusus juga semestinya harus mampu memberikan wadah secara terencana untuk memberikan pencerahan terhadap kemelut yang sedang dihadapi bangsa Indonesia yang bermasyarakat multikultural. Ia juga harus mampu menyelesaikan problematika bangsa ini secara damai, sehingga di sinilah peran Islam secara hakiki sebagai agama *rahmatan li al-'ālamīn* yang menjadi misi kenabian diutusnyanya Muhammad di bumi ini dapat memberikan warna indah dalam kehidupan manusia, dan tidak hanya bersifat teori dan retorika belaka.

### Fenomena Buruk Bangsa Indonesia di Era Globalisasi

Samuel P. Huntington dalam sebuah buku *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* yang menjadi buah karya monumentalnya pernah mengemukakan bahwa:

“Pada akhir 1980-an, dunia komunis berada di ambang kehancuran, dan perang dingin menjadi catatan sejarah. Setelah berakhirnya perang dingin, yang menjadi persoalan terpenting bukanlah persoalan-persoalan ideologis, politis, ataupun persoalan ekonomi, tetapi persoalan budaya.

.....orang-orang saling mengidentikkan diri melalui asal-usul (keturunan), agama, bahasa, sejarah, nilai-nilai, adat kebiasaan, dan institusi-institusi. Mereka mengidentifikasikan diri dengan berbagai

---

6 Imam Suprayogo, *Paradigma.....*, hlm. 2 dan 213.

kelompok kultur (budaya); suku-suku bangsa, kelompok-kelompok etnis, komunitas-komunitas keagamaan, kebangsaan, dan pada wilayah yang paling luas, peradaban-peradaban.

Orang-orang menggunakan politik tidak hanya demi kepentingan-kepentingan mereka semata, tetapi juga untuk menyatakan identitas mereka. Kita hanya akan tahu siapa kita, ketika kita mengetahui siapa “yang bukan kita” dan itu hanya dapat diketahui melalui “dengan siapa kita sedang berhadapan”.<sup>7</sup>

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, fakta yang terjadi pada bangsa-bangsa di dunia termasuk juga Indonesia dengan munculnya fenomena-fenomena buruk yang mengancam eksistensi kehidupan manusia yang beragam kultur menjadi semakin memperkuat pernyataan Huntington di atas. Era globalisasi di mana kehidupannya telah terintegrasi dalam dunia *cyber*, manusia telah diseragamkan oleh produk budaya global yang secara bersamaan dengan globalisasi itu sendiri juga akan melahirkan budaya populer baru. Orang tidak ingin hidup yang biasa-biasa saja. Mereka cenderung akan mengekspresikan pola kehidupan dengan gaya hidup yang sesuai dengan semangat zamannya. Di Barat, orang telah banyak menerima status keagamaan menjadi ateis –setidaknya menolak praktik beragama dan menerima agama dalam perspektif spiritualisme (*religion no, but spiritualism yes*)-. Keberadaan seperti ini berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, yang justru terjadi peningkatan dalam pengamalan spiritual dan praktik beragamanya dengan gerakan ‘purifikasi Islam’, bahkan pada tahap fundamentalisme.<sup>8</sup>

---

7 Samuel. P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, terj. M. Sadat Ismail, (Yogyakarta: Qalam, 2010), hlm. 7-8. Dalam buku ini juga, terhadap masa depan perkembangan Islam di dunia, Huntington dengan analisis *futuristic*-nya menyatakan bahwa Islam dari tahun ke tahun akan terus mengalami kemajuan. Hal ini menurutnya karena Islam berkembang melalui dua pola yaitu *konversi* dan *reproduksi* (berbeda dengan Kristen yang hanya tumbuh dengan jalan konversi saja). Dengan pola itu, sehingga tak heran jika Huntington menunjukkan bahwa pada peralihan abad XX, di antara kedua agama besar itu pemeluk Islam akan melebihi pemeluk Kristen dan mencapai  $\pm 30\%$  dari seluruh penduduk dunia pada tahun 2025.

8 Andrik Purwasito, *Komunikasi Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 40.

Sebagaimana dikemukakan oleh Purwasito,<sup>9</sup> sebagai akibat dari globalisasi, maka setiap warga desa global pada lingkup komunitas yang terkecil akan tersentuh oleh budaya global sebagai 'budaya sanding', meskipun pada akhirnya mereka mempunyai pilihan dan modenyanya sendiri-sendiri. Pada saat itu, globalisasi diterima secara kritis, dan oleh karenanya mereka akan membuat budaya tandingan (*counter culture*) dengan pola hidup dan kebudayaannya sendiri. Fenomena global seperti ini yang kemudian oleh Purwasito dikatakan bahwa pengeboman WTC pada 11 September 2001 oleh teroris adalah sebagai kelengahan AS karena arogansi akan globalisasi yang mereka ciptakan sendiri. Fenomena global selanjutnya juga terus berlangsung dengan akselerasi makin tinggi, selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju terus tanpa dapat dicegah, di tengah ketegangan situasi dunia yang belum berhenti ditandai dengan kekacauan hubungan antarnegara, terorisme dan kolonialisme baru. Kekacauan peradaban di tengah gegap gempitanya globalisasi terlihat dalam lingkungan global yang semakin memprihatinkan, baik dalam segmen demografis, sosiokultural, ekonomi, teknologi, politik maupun dalam segmen hukum serta budaya global.<sup>10</sup>

Dalam konteks ke-Indonesiaan, nampaknya analisis yang dinyatakan oleh Huntington cukup mengena pada masyarakat dan bangsa Indonesia. Bagi Indonesia, era globalisasi tampak lebih sebagai sebuah tantangan ketimbang sebagai berkah. Hal ini dapat dilihat pada kondisi bangsa Indonesia sejak dekade terakhir ini yaitu dengan beragamnya konflik sebagaimana disebutkan di atas. Kondisi ini dapat dimulai dengan melihat 'euforia reformasi' yang diikuti oleh berbagai peristiwa anarkis, pelecehan hukum dan merosotnya moral birokrasi, dan pemerintah, merebaknya kriminalitas, dekadensi moral di tengah masyarakat yang membuat orang apriori terhadap kemauan baik pemerintah, dan meningkatnya pergolakan di aras lokal menyulut perubahan pemikiran dan kesangsian akan masa depan.

---

9 Seorang Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional dan sekaligus sebagai Ketua Program Studi Hubungan Internasional FISIP-UNS Surakarta. Pendidikan Akademiknya diperoleh dari studinya di FISIPOL UGM (1981), dan selanjutnya ia melanjutkan studinya di Ecoles des Hautes Etudes en Science Sociales, Paris, Perancis (1992).

10 *Ibid.*, hlm. 42-45.

Kenyataan adanya konflik yang terjadi Indonesia, sebagaimana dinyatakan oleh Kasdin Sihotang setidaknya bersumber pada empat fenomena buruk yang telah menghantam bangsa ini:<sup>11</sup>

*Pertama*, adanya disorientasi nilai-nilai Pancasila sebagai basis filosofi bangsa Indonesia. Sejak Orde Baru Runtuh, eksistensi Pancasila mengalami resistensi, bahkan cenderung diabaikan dari realitas hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini terjadi karena bangkitnya logika 'bengkok' masyarakat yang mengidentikkan Pancasila dengan Orde Baru. Hipotesisnya, karena Orde Baru sudah runtuh, maka Pancasila pun juga harus runtuh, sebab Pancasila adalah produk dari Orde Baru. Lebih menyedihkan lagi menurut Sihotang, bahwa argumen menyesatkan itu rupanya tidak saja muncul di tengah masyarakat, melainkan juga menjalar ke dunia pendidikan terutama di masa awal reformasi. Demikian ini, menurutnya dapat terlihat dari fakta akan minimnya perhatian pada Pendidikan Pancasila baik di tingkat dasar, menengah maupun di perguruan tinggi.

*Kedua*, adanya pergeseran nilai-nilai etis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pembangunan ekonomi, selain dampak positif yang didapatkan, ia juga tidak sedikit telah membawa dampak negatif dalam relasi sosial, seperti munculnya pergeseran terhadap nilai-nilai etika dalam kehidupan personal dan sosial. Dalam kehidupan personal, hal ini tampak dalam bangkitnya semangat individualisme dan kecenderungan seseorang dalam mengagungkan sikap materialisme dan pragmatis, yang selanjutnya kecenderungan ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang konsumeris. Bahaya lebih lanjut dalam hal ini menurut Sihotang adalah dengan munculnya pergeseran pola pikir dalam memaknai eksistensi. Eksistensi persona ini tidak lagi diletakkan pada kemampuan berpikir, melainkan pada kemampuan mengumbar naluri keserakahan dan libinal. Dalam masyarakat seperti ini, sebagaimana ia mengutip pernyataan Jean P. Baudrillard telah terjadi pergantian adagium, dari *cogito ergo sum*, artinya "saya berpikir maka saya ada" ke adagium *consumeo ergo sum*, artinya "saya mengkonsumsi, maka saya ada", yang pada akhirnya gaya hidup konsumeris

---

<sup>11</sup> Kasdin Sihotang, *Pendidikan Multikultural: Membangun Karakter Inklusif-Kritis*, dalam *Multikulturalisme: Cerdas Membangun hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis*, (Jakarta: Indeks, 2015), hlm. v-viii.

ini juga akan membawa orientasi pola pikir buruk dalam relasi sosial. Pola pikir buruk tersebut secara mencolok seperti dikemukakan oleh Sihotang adalah dengan adanya sikap apatisme dan solidaritas mekanistik eksklusif yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam kondisi demikian, terminologi “kekamian” seperti yang ditengarai oleh Fuad Hasan akan begitu kuat muncul dalam menggantikan “kekitaan”, yang artinya bahwa seseorang hanya akan memperdulikan mereka yang sealiran dan yang sejalan, baik dalam politik maupun dalam keyakinannya.<sup>12</sup>

*Ketiga*, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Di antara fakta yang sekarang menghantui masyarakat adalah gempuran alat komunikasi yang begitu canggih dan pesat. Kehadiran alat-alat komunikasi ini, sebagaimana diistilahkan oleh Eric Schmidt dan Jared Cohen sebagai dunia digital mempunyai dua sisi instrumen yaitu 1) terbukanya cakrawala baru tentang bisnis dan negara dengan konsep aspasial dan atemporal.<sup>13</sup> 2) terjadinya perubahan kehidupan manusia, bahkan akan menentukan masa depan identitas pribadi dan eksistensi kewargaan individu secara global. Dunia maya yang menyertai kehadiran alat-alat komunikasi ini akan membawa seseorang pada kecenderungan mengumbar kepalsuan, yang sebagai imbasnya akan diikuti dengan menurunnya pengakuan keabsahan dan internalisasi nilai-nilai budaya asli. Dalam hal ini, relasi sosial yang berbasis kepercayaan dan kerjasama nyata dalam bentuk tindakan konkret, akan digantikan oleh ungkapan-ungkapan emosional belaka dalam akun pribadi di dunia maya tersebut. Dalam kultur demikian ini, identitas pribadi akan semakin ditentukan oleh kegiatan dan pergaulan di dunia maya –semakin aktif meng-update status, akan semakin merasa diri eksis-. Sadar atau tidak sadar, kenyataan ini seperti dikemukakan oleh Sihontang telah menghiasi kehidupan masyarakat Indonesia yang sebagai akibatnya adalah dengan tersingkirkannya kesadaran terhadap internalisasi nilai-nilai budaya luhur bangsa.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Fuad Hasan, *Psikologi-Kita & Eksistensialisme: Pengantar Filsafat Barat, Berkenalan dengan Eksistensialisme, Kita dan Kami*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 273.

<sup>13</sup> Aspasial di sini dimaksudkan dengan tidak adanya ketergantungan pada ruang, sedangkan atemporal mempunyai arti dengan tidak tergantungnya pada waktu.

<sup>14</sup> Di antara kalangan yang paling rentan terkena dampak ini adalah generasi muda. Kekhawatiran ini cukup beralasan, dengan mengingat sifat mereka yang masih labil, yang

*Keempat*, ancaman disintegrasi bangsa. Ancaman ini menurut Sihotang tidak hanya terjadi dalam penghayatan nilai-nilai dasar kebangsaan yang mengalami degradasi, melainkan juga terhadap rasa kebangsaan dalam arti mengakui sesama anak bangsa dan alat negara sebagai bagian integral dirinya yang semakin menipis. Maraknya konflik yang bersifat vertikal dan horizontal, bahkan dengan munculnya anarkisme dan vandalisme yang akhir-akhir ini terjadi menurutnya sudah cukup untuk dijadikan sebagai bukti akan adanya ancaman disintegrasi tersebut.

Hampir sama dengan empat fenomena buruk seperti disebutkan oleh Sihotang di atas, menurut Suprayoga terkait dengan problem kebangsaan yang dialami oleh bangsa Indonesia memanglah cukup banyak. Namun demikian, menurutnya semua akan bertumpu kepada tiga persoalan bangsa yang cukup mendasar dan seharusnya segera mendapatkan perhatian dan dicarikan langkah-langkah guna memperbaikinya jika bangsa Indonesia benar-benar ingin membangun kembali peradaban yang tangguh dan mulia. Tiga persoalan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya tersebut adalah; *pertama*, kualitas pendidikan yang rendah dari berbagai jenjang, *kedua*, kesenjangan sosial yang sedemikian jauh antara mereka yang miskin dan kaya, *ketiga*, persoalan moral, karakter, atau akhlak bangsa.<sup>15</sup>

Keterkaitan dari ketiga persoalan tersebut menurut Suparyogo dapat dikatakan bermula dari lemahnya pendidikan. Pendidikan sebagaimana dimaksud di sini karena ia baru berorientasi pada persoalan yang menyentuh aspek-aspek formal seperti halnya perlu tidaknya dilaksanakan ujian negara, sementara problem pendidikan itu sendiri sesungguhnya bukan hanya terletak pada hal tersebut. Dalam kaitannya antara pendidikan dengan kesenjangan sosial yang terjadi, maka sejatinya pendidikan yang diperlukan pada hari ini adalah pendidikan yang bisa memberdayakan para peserta didik agar ia benar-benar dapat berhasil meraih kemampuan yang diinginkan oleh mereka. Pendidikan dalam hal

---

membuat mereka begitu gampang terbawa arus, bahkan tenggelam dalam maraknya nilai-nilai budaya asing.

<sup>15</sup> Imam Suprayogo, *Spirit Islam: Menuju Perubahan & Kemajuan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 37.

ini juga harus memiliki kekuatan idealisme yang tinggi. Ia harus dijauhkan dari mereka yang sebatas berupaya untuk mencari kehidupan dan apalagi kekayaan. Lebih jauh lagi, dalam praktik pendidikan yang dilakukan, untuk mewujudkan tujuan daripada pendidikan yaitu memanusiakan manusia, maka ia harus dilakukan dengan didasari oleh rasa cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab antar sesama terhadap kehidupan generasi mendatang. Pendidikan yang gagal menggapai tujuannya yaitu memanusiakan manusia menurut Suprayogo akan berakibat menjadikan kehidupan manusia itu semakin menjauh dari nilai-nilai luhur yang seharusnya dijunjung tinggi. Sebagai makhluk sosial, kehidupan manusia seharusnya lebih mulia daripada makhluk lainnya, dan dalam konteks hidup bermasyarakat yang beragam dan multikultural, manusia dengan kekuatan pikir dan dzikirnya seharusnya bisa saling mengasihi, saling menghargai, menghormati, tolong menolong, memiliki rasa syukur, ikhlas, sabar, istoqamah, bersedia berkorban dan memiliki nilai-nilai mulia yang lainnya.<sup>16</sup>

Seperti dikemukakan oleh Amin Abdullah, memang terkait dengan permasalahan pokok yang dihadapi pendidikan dan penggerak sosial-keagamaan dalam masyarakat yang beragam dan multikultural, hal ini akan mengalami sesuatu yang bersifat dilematis. Setiap kelompok sosial secara internal akan tertuntut untuk tetap dapat mengawetkan tradisi mereka, memelihara, melanggengkan, mengalihgenerasikan, serta mewariskan kepercayaan dan tradisi yang diyakini sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Namun, pada saat yang sama juga harus menyadari sepenuhnya akan keberadaan kelompok tradisi lain yang juga berbuat serupa. Sebagai solusi dalam kehidupan yang multireligius dan multikultural tersebut, menurutnya selain pendidikan harus difungsikan untuk memperkuat identitas diri dan kelompoknya, maka upaya lain yang seharusnya tidak boleh ditinggalkan adalah dengan menanamkan tradisi untuk menjaga kebersamaan, kohesi sosial, dan keutuhan bersama. Dalam konteks fungsi pendidikan ini, juga harus disadari betul bagaimana implikasi dan konsekuensi dari cara, metode, pilihan materi, serta teknik pendidikan dan pengajaran agama yang disajikan kepada masyarakat yang bercorak

---

<sup>16</sup> Imam Suprayogo, *Spirit.....*, hlm. 36-38.

plural-majemuk-terbuka seperti sekarang ini.<sup>17</sup> Pendidikan multikultural seperti banyak dikemukakan oleh para pakar ditengarai mampu menjadi sebuah solusi dalam menghadapi permasalahan pokok pendidikan tersebut. Pendidikan semacam ini di era multikultural dan multireligius diyakini dapat mewujudkan hakikat daripada tujuan pendidikan di tengah kehidupan masyarakat, seperti halnya menjaga kebersamaan dan keutuhan secara bersama-sama.

### **Pendidikan Multikultural**

Multikultural dalam kualifikasi pendidikan, tidak dapat dilepaskan dari definisi *multikulturalisme* yang mempunyai arti sebagai gerakan sosial-intelektual yang mendorong nilai-nilai keberagaman (*diversity*) sebagai prinsip inti dan mengukuhkan pandangan bahwa semua kelompok budaya diperlakukan setara (*equal*) dan sama-sama dihormati.<sup>18</sup> Terkait dengan nilai-nilai keberagaman tersebut, di dunia non-Barat, sebagaimana dikatakan oleh Hefner hanya sedikit saja daerah-daerah yang mengilustrasikan warisan dan tantangan pluralisme budaya secara lebih mencolok daripada negara-negara di Asia Tenggara –Malaysia, Singapura, dan Indonesia–. Dengan menggunakan pendekatan politik, Hefner mengemukakan bahwa dalam teori politik Barat, masa 1930-an dan 1940-an, para pendahulu kolonial dari masyarakat itu, yang waktu itu dikenal dengan nama British Malaya dan Hindia Belanda, dianggap sebagai lokus klasik bagi konsep bentukan baru tentang keberagaman. Lebih lanjut, dengan menggunakan istilah “masyarakat majemuk”, J.S. Furnivall –seorang administrator dan penulis politik Inggris– seperti dikatakan oleh Hefner telah memperkenalkan para pembaca Barat dengan gagasan tentang masyarakat majemuk, serta mengidentifikasi negara-negara yang sekarang ini disebut Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai contoh yang paling menonjol dalam keberagaman kultur yang terdapat di

---

<sup>17</sup> M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*, (Jakarta: PSAP, 2005), hlm. 2-3.

<sup>18</sup> Zakiyuddin Baidhawiy, *Studi Islam: Pendekatan dan Metode*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2011), hlm. 212.

dalamnya. Bagi Furnivall, seperti dikatakan oleh Hefner, bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaaur, dalam satu unit politik.<sup>19</sup>

Dalam konteks pembangunan bangsa, istilah multikultural selanjutnya telah membentuk sebuah ideologi yang disebut dengan multikulturalisme. Istilah multikultural yang tidak dapat dilepaskan dari definisi multikulturalisme dalam pandangan Bikhu Parekh merupakan jawaban atas kegagalan tiga tradisi besar monisme moral yang berkembang dalam kehidupan; yaitu monisme Yunani, monisme Kristen, dan monisme liberal klasik. Salah satu kegagalan *monisme* moral menurutnya adalah adanya cara pandang terhadap perbedaan yang dinyatakan sebagai penyimpangan atau patologi moral.<sup>20</sup>

Masih menurut Parekh, dalam multikulturalisme terdapat tiga hal yang sangat urgen untuk dipahami; *Pertama* bahwa manusia secara kultural dilekatkan dalam posisi bahwa mereka tumbuh dan hidup dalam dunia yang terstruktur secara kultural, mengorganisasikan kehidupan dan hubungan-hubungan sosial menurut sistem makna, serta memposisikan nilai yang besar tentang identitas kultural mereka. *Kedua* bahwa kebudayaan-kebudayaan yang berbeda mencerminkan sistem makna dan pandangan tentang jalan hidup yang baik. Setiap kebudayaan merupakan sistem makna yang dijadikan sebagai pedoman oleh masing-masing dari mereka. Dalam hal ini, maka keunikan, kecirikhasan dan manifestasi kebudayaan yang satu dengan lainnya merupakan sesuatu yang sangat wajar sehingga setiap kebudayaan tidak bisa disepadankan sebagaimana yang lebih baik. *Ketiga* bahwa semua kebudayaan kecuali yang paling primitif secara internal bersifat majemuk dan mencerminkan percakapan berkelanjutan antara tradisi dan rangkaian gagasan mereka yang berbeda-beda.<sup>21</sup>

---

19 Robert W. Hefner, *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapura, and Indonesia*, terj. Bernardus Hidayat, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 16.

20 Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, (Yogyakarta: Impulse, 2008), hlm. 71-76.

21 Bikhu Parekh, *Rethinking.....*, hlm. 440-443.

Jika istilah tentang multikulturalisme tersebut ditelaah secara mendalam dan dibawa ke dalam ranah pendidikan, maka paham tentang multikultural tersebut di atas sejalan dengan rekomendasi UNESCO tahun 1994 di Jenewa tentang pendidikan multikultural, yang setidaknya harus memuat beberapa pesan di antaranya adalah: *Pertama*, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinekaan pada masing-masing individu, jenis kelamin, masyarakat dan budaya, serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama dengan yang lainnya. *Kedua*, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh terhadap perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. *Ketiga*, pendidikan hendaknya dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan konflik secara damai tanpa adanya kekerasan. Oleh karena itu, maka pendidikan hendaknya juga mampu meningkatkan pengembangan kedamaian dalam pikiran peserta didik sehingga mereka mampu membangun dan memelihara secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, dan kemauan untuk berbagi dengan yang lainnya.<sup>22</sup> Beberapa rekomendasi ini memberikan petunjuk terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam pendidikan multikultural di antaranya adalah nilai persamaan, nilai kesederajatan, nilai toleransi, nilai perdamaian, nilai persaudaraan dan kerjasama, nilai demokrasi, nilai kebebasan, dan nilai keadilan.

Seperti dikemukakan oleh Azra, multikulturalisme pada hakikatnya merupakan bagian daripada politik kebudayaan, yaitu sikap peduli dan mau mengerti (*difference*) atau *politics of recognition* dalam rangka memperjuangkan nasib sekelompok masyarakat (minoritas) dalam suatu negara yang memiliki perbedaan budaya (agama, etnik, suku, dan sebagainya) dengan budaya *mainstream* yang dominan dianut oleh masyarakat lainnya.<sup>23</sup> Agar kebudayaan yang dianut oleh kelompok

---

<sup>22</sup> Salmiwati, *Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam Pengembangan Nilai-Nilai Multikultural*, Jurnal Al-Ta'lim (Vol. 20, No. 1, 2013), hlm. 338.

<sup>23</sup> Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, (Yogyakarta: Impulse, 2007), hlm. 26-27.

minoritas tersebut tidak diganggu atau terancam punah, serta berbenturan dengan budaya lainnya (*mainstream*), maka menurut Nata diperlukan suatu budaya lain yang dapat berfungsi sebagai pengikat, perekat, penghubung dan pengaman dalam menjamin keberlanjutan dan keamanan budaya yang dianut oleh kalangan minoritas tersebut. Dalam kaitan dengan hal ini, maka selain multikulturalisme sebagai kebijakan politis, ia juga dapat berwujud kebijakan yang bersifat sosial, moral dan kultural, yang salah satunya dengan melalui pendidikan. Budaya lain sebagaimana dimaksud sebagai pengikat, perekat, penghubung dan pengaman eksistensi keragaman budaya tersebut adalah ajaran-ajaran yang mengandung nilai-nilai kesamaan dalam mengemukakan pendapat dan lainnya (demokrasi), persamaan di depan hukum atau keadilan (*equality before law*), kebebasan (*freedom and liberty*), dan pengakuan atas adanya keragaman (*pluralism*).<sup>24</sup>

Pendidikan multikultural sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan kebijakan politis dalam keberagaman budaya masyarakat, menurut Azra dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif dan normatif, kurikulum pendidikan multikultural menurutnya harus mencakup subyek-subyek daripada nilai-nilai multikultural seperti: toleransi, tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural, dan agama; bahaya diskriminasi; penyelesaian konflik dan mediasi; HAM; demokrasi dan pluralitas; kemanusiaan universal, dan subyek-subyek lain yang relevan.<sup>25</sup>

Secara normatif, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kemajemukan yang ada di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara sebenarnya telah lama dimiliki, dan motto *Bhineka Tunggal Ika*-nya pun telah pula akrab dalam kesehariannya. Namun, sayangnya kesadaran terhadap motto itu selama ini pada umumnya hanya menempati kesadaran kognitif masyarakat, sekedar menjadi *lip service* penguasa politik dan masih belum sampai diimplementasikan secara nyata dan tepat dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-sehari.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 237.

<sup>25</sup> Azyumardi Azra, *Merawat.....*, hlm. 27.

<sup>26</sup> Yaya Suryana dan H. A. Rusdiana, *Pendidikan Multikultural: Suatu Upaya penguatan Jati Diri Bangsa*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 193.

Upaya menumbuhkan kesadaran yang tidak hanya pada tataran kognitif, akan tetapi juga pada ranah psikomotorik dan afektif dalam dunia pendidikan merupakan hal yang penting, strategis, dan determinatif bagi masyarakat. Asumsi demikian ini tidak lain karena didasarkan bahwa maju-mundurnya kualitas peradaban suatu masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Purwanto adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan ruhaninya ke arah kedewasaannya. Rumusan tentang pendidikan, di Indonesia lebih jauh dijelaskan dalam UU No. 20 tahun 2003, bahwa pendidikan bertujuan agar masyarakat Indonesia memiliki pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia bangsa Indonesia.<sup>27</sup> Arah dari proses pendidikan nasional dalam hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat untuk *survive* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, maka dapat dikatakan bahwa secara filosofis tujuan pendidikan itu sendiri adalah untuk menjadikan manusia menjadi manusia.<sup>28</sup>

Dalam konteks ke-Indonesiaan yang mana terdapat beranekaragam kultur pada masyarakatnya, maka terhadap upaya pendidikan multikultural sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam hal ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk menata masyarakat (bangsa) yang plural (majemuk) menjadi masyarakat yang multikulturalistik, stabil, dan dinamis. Anggota masyarakat yang pluralistik yang hidup dalam sekat-sekat budaya sendiri-sendiri dan hanya memasuki wilayah publik untuk kegiatan-kegiatan bersama, seperti pasar, sekolah, kerja dengan resiko yang muncul di dalamnya adalah adanya budaya mayoritas dan minoritas, adanya budaya yang berpotensi mendominasi dan didominasi, maka dengan pendidikan

---

27 Yaya Suryana dan H. A. Rusdiana, *Pendidikan.....*, hlm. 71.

28 Menjadikan orang yang bijaksana (penuh hikmah) dengan jalan memanusikan manusia, sebagaimana dinyatakan oleh Socrates dan Nietzsche juga menjadi orientasi daripada filsafat. Sehingga dengan begitu, maka pembicaraan tentang pendidikan sesungguhnya tidak dapat terlepas dengan pembahasan terhadap filsafat. Lih. Achmad Tafsir, *Filsafat Umum*, (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2002), hlm. 45.

multikultural, hal ini akan diupayakan untuk menatanya menjadi bangsa yang multikulturalistik dan mampu membangun saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.<sup>29</sup>

Pendidikan multikultural sebagaimana didefinisikan oleh James Banks merupakan suatu rangkaian kepercayaan (*set of beliefs*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, ataupun negara. Pendidikan multikultural adalah ide, gerakan, pembaharuan pendidikan, dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan agar siswa laki-laki dan perempuan, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis sekolah.<sup>30</sup> Pemikiran Banks tersebut tampak sejalan dengan konsep pendidikan pembebasan yang diutarakan oleh Paulo Freire, bahwa pendidikan bukanlah “menara gading” yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Menurut Freire, pendidikan harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya.<sup>31</sup>

Menurut Molan, dalam membangun masyarakat plural seperti di Indonesia, pendidikan tidak hanya harus dijalankan dengan mengembangkan sikap bebas saja, melainkan juga harus dikembangkan sikap menghargai kesetaraan dan mengekspresikan kebebasan tersebut dalam batas-batas kesetaraan. Pendidikan yang sesuai dengan hal itu, menurutnya adalah pendidikan karakter yang ditunjang dengan

---

29 Benyamin Molang, *Multikulturalisme: Cerdas Membangun hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis*, (Jakarta: Indeks, 2015), hlm. 125-126.

30 James Banks, *Multicultural Education: Issues and Perspectives*, (London: Allyn and Bacon Press, 1989), hlm. 3.

31 Dalam hal ini, pendidikan teknis dan ilmiah menurut Freire tidak boleh bertentangan dengan pendidikan humanistik sepanjang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat revolusioner membantu pembebasan abadi dan humanisasi. Lih. Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, terj. Utomo Danandjaya, (Jakarta: LP3ES, 2013), hlm. 178-179.

pendidikan untuk bersikap kritis, pendidikan yang membuka wawasan, dan pendidikan etika. Pendidikan semacam ini akan menjadi baik jika dilakukan sejak dini, mulai dari keluarga dan pendidikan dasar, dengan metode yang lebih banyak dimulai dari wilayah psikomotorik. Dalam hal efektifitas diberlakukannya pendidikan ini, menurut Molang dalam jenjang pendidikan lanjutan akan lebih baik jika berangkat dari wilayah afektif, dan pada tingkat perguruan tinggi, metode pendidikan akan lebih baik jika banyak bertumpu pada wilayah kognitif.<sup>32</sup>

Dalam pendidikan multikultural, proses pembelajaran yang dilakukan seharusnya mampu memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah perspektif monokultural yang esensial, penuh prasangka dan diskriminatif ke dalam bentuk perspektif multikulturalis yang menghargai keragaman, perbedaan, toleran, dan sikap terbuka. Perubahan paradigma semacam ini seperti dikemukakan oleh Mahfud menuntuk transformasi yang tidak terbatas pada dimensi kognitif belaka. Lebih jauh, menurutnya bahwa signifikansi pendidikan multikultural di Indonesia dapat dijelaskan dalam empat fungsi, di antaranya;<sup>33</sup> *pertama*, pendidikan multikultural sebagai sarana alternatif pemecahan konflik sosial. Spektrum kultur masyarakat Indonesia yang amat beragam dalam hal ini akan menjadi tantangan bagi dunia pendidikan guna mengolah perbedaan tersebut menjadi suatu aset, dan bukan sebagai sumber perpecahan. *Kedua*, pendidikan multikultural sebagai pembina agar peserta didik tidak tercerabut dari akar budayanya. Dalam hal ini pendidikan multikultural selain sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, ia juga menjadi signifikan dalam membina siswa agar mereka tidak tercerabut dari akar budaya yang dimilikinya tatkala berhadapan dengan realitas sosial-budaya di era globalisasi seperti sekarang ini. *Ketiga*, pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum pendidikan. Sebagai titik tolak dalam proses belajar mengajar, atau guna memberikan sejumlah materi dan isi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik dengan ukuran dan tingkatan tertentu, maka pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum

<sup>32</sup> Benyamin Molang, *Multikulturalisme.....*, hlm. 126.

<sup>33</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 259-261.

dalam hal ini akan menjadidi sangat penting. *Keempat*, pendidikan multikultural akan menciptakan masyarakat yang multikulturalistik. Sebagaimana menjadi cita-cita reformasi untuk membangun kembali dan merombak terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun oleh Orde Baru, yaitu dengan terwujudnya sebuah masyarakat sipil yang demokratis, penegakan hukum untuk supremasi keadilan, pemerintahan yang bebas KKN, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat, maka dalam hal ini pendidikan multikultural akan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya tersebut.

### Paradigma Politik Islam Terhadap Pendidikan Multukultural

Pendidikan Islam dalam arti kelembagaan di dalamnya terdapat kegiatan yang menjadikan Islam sebagai identitasnya, baik kegiatan itu dinyatakan dengan semata-mata maupun tersamar. Pendidikan Islam dalam perkembangan terakhir memberikan pengertian secara lebih substansial sifatnya, yaitu bukan sebagai proses belajar mengajar, maupun jenis kelembagaan saja, akan tetapi dalam pendidikan ini lebih ditekankan kepada suatu iklim pendidikan atau *education atmospher* dengan suasana pendidikan yang Islami, memberikan nafas keislaman terhadap semua elemen dari sistem pendidikan yang ada.<sup>34</sup> Dalam pengertian tentang pendidikan ini, tidak lain dimaksudkan sebagai langkah awal dalam mengkaji pendidikan Islam secara lebih mendalam, yaitu dengan mengkaji dasar filosofisnya dari sumber ajaran Islam yang selanjutnya dapat ditentukan arah tentang pendidikan itu termasuk metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan sumber yang menjadi landasannya.

Islam sebagai sistem nilai universal dan diyakini mutlak kebenarannya harus memberi paradigma filosofis dan teologis terhadap pendidikan Islam itu sendiri dan ia juga seharusnya mampu mengejawantahkan nilai-nilai Islam di dalamnya, baik secara ontologis, epistemologis dan aksiologisnya. Jika hal itu dapat diwujudkan dalam pendidikan Islam maka akan tampaklah hikmah yang secara nyata dapat dirasakan peran dan gunanya dalam memenuhi kebutuhan manusia.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Tobroni, *Pendidikan Islam: Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualitas*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 13.

<sup>35</sup> Hal semacam ini dalam teori pembelajaran tampak sepaham dengan teori

Secara ideal, pendidikan Islam dapat dijadikan wahana untuk mengembangkan moralitas universal yang andal dalam agama sekaligus mengembangkan teologi inklusif dan pluralis. Namun demikian, tidak jarang pendidikan Islam selama ini cenderung menampilkan wajahnya yang eksklusif dan dogmatis. Sebagai akibatnya, cita-cita luhur untuk menciptakan masyarakat majemuk yang harmonis, dengan perbedaan dan keanekaragaman budaya yang dimiliki mampu berfungsi sebagai sumber daya yang memperkaya pemikiran dan peradaban harus diterima sebagai sebuah impian saja.<sup>36</sup>

Keasadaran adanya fenomena bahwa “satu Tuhan, banyak agama” merupakan fakta yang dihadapi manusia sekarang ini. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keharmonisan hidup bersama maka manusia sekarang ini harus didorong mimpinya itu menuju kesadaran bahwa pluralisme dan multikulturalisme memang sungguh-sungguh fitrah kehidupan manusia. Dorongan kepada setiap orang untuk dapat menghargai ‘keanekaragaman’ adalah sangat penting dilakukan terutama di negara Indonesia yang pluralistik. Salah satu problem besar di mana peran agama menjadi sangat dipertanyakan adalah dengan seringnya terjadi konflik etnis, kultur dan religius. Peran agama pada tataran teologis, dalam pendidikan agama (baca: Islam) di sini perlu dilakukan dengan jalan mengubah paradigma teologis yang pasif, tekstualis, dan eksklusif menuju teologi yang saling menghormati, saling mengakui eksistensi, berpikir dan bersikap positif, serta saling memperkaya iman. Dalam konteks ini sebagaimana dikemukakan oleh maksum, muaranya adalah untuk membangun interaksi antar umat beragama yang tidak hanya berkoeksistensi secara harmonis dan damai, tetapi juga bersedia aktif dan pro-aktif terhadap kemanusiaan.<sup>37</sup>

psikoanalitik dalam proses perkembangan. Dalam teori ini, pemenuhan kebutuhan yang memiliki perbedaan sebagai fungsi dalam tingkat perkembangan adalah suatu yang ditekankan. Misi dari ajaran Islam sebagai kebutuhan dengan serangkaian tahapan akan dipandang sebagai perubahan progresif. Dalam memenuhi kebutuhan itu seorang akan melalui tahapan, yang dari tiap tahapan itu memiliki perbedaan secara kualitatif dengan tahapan sebelumnya. Keberhasilan dari proses perkembangan dalam pemenuhan kebutuhan itu selanjutnya akan terkait erat dengan penyelesaian dari setiap konflik (sebagai fungsinya) yang muncul dari tahapan-tahapan tersebut. Lih. Daleh H. Schunk, *Learning Theoris: An Educational Perspective*, terj. Eva Hamdiah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 612.

36 Yaya Suryana dan H. A. Rusdiana, *Pendidikan .....*, hlm. 193.

37 Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru*

Sulalah dalam bukunya yang berjudul *Pendidikan Multikultural: Didaktika Nilai-Nilai Universalitas Kebangsaan* memberikan suatu pernyataan:

Lembaga pendidikan Islam sebagai institusi sosial pendidikan dan keagamaan dinilai mungkin untuk melakukan proses penumbuhkembangan kehidupan masyarakat multikultural. Proses ini pada hakikatnya tetap berbasis pada lembaga pendidikan keagamaan sebagai *civil education*. Lembaga pendidikan keagamaan memiliki potensi untuk melakukan proses rekayasa sosial dengan hanya membalik paradigma atau orientasinya yang *eksklusif* menjadi *inklusif*, yang tadinya masih bersifat doktriner, dogmatis, dan tidak berwawasan multikultural, diubah orientasi, pendekatan, metodologinya, agar menjadi institusi pendidikan yang inklusif. Jika tidak malah justru memunculkan ekse negatif, yakni permusuhan antar agama, antar budaya, antar suku, dan antar golongan. Di Indonesia, pemicu konflik seringkali bersumber dari kesalahfahaman dari kultur yang berbeda, baik disebabkan perbedaan agama, perbedaan etnis, maupun strata sosial. Atas dasar ini, maka pendidikan berwawasan multikultural menjadi sangat penting. Artinya, pendidikan multikultural dimaksudkan menjadi pendidikan alternatif yang memberi ruang bagi eksistensi, pengakuan, dan penghormatan kepada budaya-budaya lain.<sup>38</sup>

Pendidikan multikultural merupakan salah satu alternatif yang menawarkan penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, ajaran agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, dan sebagainya. Lebih dari itu, dalam pendidikan multikultural juga diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai yang menjadi karakter intinya seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme atau menanamkan nilai-nilai keberagaman yang inklusif, toleran dan peduli dalam pencegahan terhadap terjadinya tindak kekerasan dan konflik komunal di tengah masyarakat yang serba plural. Dengan demikian, pada gilirannya output yang dihasilkan dari corak pendidikan ini tidak hanya cakap sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai

---

*Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. (Malang: Aditya Media, 2011), hlm. 200-201.

<sup>38</sup> Sulalah, *Pendidikan Multikultural: Didaktika Nilai-Nilai Universalitas Kebangsaan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 2.

keberagamaan dan menghargai keberadaan pemeluk atau penganut aliran keagamaan yang tidak sepeham dengan yang diikutinya.

Dalam setiap agama, teologi sebagai 'konsep kepercayaan' tidak bisa dilepaskan sebagai dasar pijakan bagi setiap pemeluknya. Pembicaraan tentang konsep ini lebih dikarenakan bahwa kepercayaan dan keyakinan adalah inti agama. Dalam ruang lingkup Islam, persoalan yang berkenaan dengan konsep kepercayaan sangat penting tidak saja karena masalah tersebut berkenaan dengan esensi dan eksistensi Islam sebagai suatu agama, tetapi hal ini juga karena menjadi titik awal dari semua pemikiran teologik di antara para pendahulu Islam.<sup>39</sup>

Paradigma politik dalam pendidikan multikultural dengan melalui dialog teologis antar agama-agama menurut Islam sangat mungkin dapat dicapai karena adanya landasan yang kuat dalam al-Qur'an. Menurut Maksum, al-Qur'an setidaknya telah menggagas empat prinsip yang menyangkut titik temu agama-agama, yaitu:<sup>40</sup> *pertama*, hakikat agama adalah agama Tuhan, yakni suatu ajaran yang telah diturunkan kepada para Nabi dan Rasul, walaupun tiap-tiap kurun dari mereka membawa syari'ah dan *minhaj* (jalan) yang berbeda-beda, seperti disebut dalam QS. al-Maidah/5: 48. *Kedua*, agama para Nabi dan Rasul adalah satu, dan agama Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah agama terakhir yang merupakan kelanjutan agama-agama sebelumnya. Misi Muhammad sebagai kelanjutan daripada agama sebelumnya ini seperti yang disebutkan dalam QS. al-Syura/42: 13. *Ketiga*, bahwa seorang Muslim tidak boleh berdebat melainkan dengan cara-cara yang paling baik, mencerca dan menghina orang lain di luar agamanya kecuali dilakukan terhadap mereka yang *zalim* dan bersifat agresif. Larangan untuk tidak berbuat demikian ini seperti disinggung dalam QS. al-Ankabut/29: 46. *Keempat*, al-Qur'an

---

<sup>39</sup> Toshihiko Izutsu, *The Concept of Belief in Islamic Theology: Asemantic Analysis of Imān and Islām*, terj. Agus Fahri Husein, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hal. 1. Dalam kata pengantarnya pada buku ini, Izutsu selain menyatakan bahwa 'kepercayaan' secara historik adalah pertama dan terpenting dari semua konsep teologi Islam, ia dengan menggunakan analisis semantik Iman dan Islam juga menguraikan sejumlah permasalahan teologi dalam Islam yang sangat signifikan timbul pada beberapa abad pertama kebudayaan Islam.

<sup>40</sup> Ali Maksum, *Pluralisme .....*, hlm. 217-219.

mengajarkan sikap inklusif dalam beragama, yakni Islam melarang adanya paksaan terhadap keberagaman seseorang. Allah telah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih agama sesuai dengan keinginan yang diyakininya dalam QS. Yunus/10: 99.

Munculnya sekelompok umat Islam yang menolak adanya sikap pluralisme, multikulturalisme dan toleransi disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang tujuan, semangat, dan esensi ajaran Islam. Sikap ekstrimisme, kekakuan, dan kebekuan ber-Islam, menunjukkan kedangkalan pengetahuan dan wawasan agama dan sosialnya. Dalam hal ini, indikasi dari *ektrimisme* itu sendiri adalah dengan tidak adanya sikap toleran.<sup>41</sup>

Pendidikan agama Islam berbasis multikultural dalam setiap pembelajaran yang dilakukan harus diorientasikan kepada sikap pluralisme dan toleransi kepada peserta didik. Dalam hal ini, bentuk toleransi yang lebih konkret seperti dijelaskan oleh Maksud terdapat tiga macam; *pertama*, toleransi antar kelompok umat sesama umat beragama. Realitas akan perbedaan pemahaman, organisasi, aliran dan budaya-budaya yang berbeda dalam setiap agama tidaklah dapat dipungkiri. Dalam hal ini, secara internal peserta didik harus ditunjukkan kepada sumber agama (Islam) yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah adalah sama, dan tetapi terdapat pemahaman dan penafsiran yang berbeda sesuai dengan realitas historis, sosial, dan lokalitas penafsirannya. *Kedua*, saling toleransi dan menghormati antar agama. Dalam suatu negara atau masyarakat pendapat sejumlah agama tertentu akan dianut dan diikuti oleh penganutnya. Oleh karena itu, dalam hal demikian ini seorang pendidik seharusnya menanamkan sikap untuk menghormati dan menghargai penganut dari agama-agama tersebut. *Ketiga*, toleransi antar semua agama dan semua keyakinan. Di

---

<sup>41</sup> Beberapa prinsip teologis ini sangat penting untuk dijadikan dasar dalam rangka membangun karakter (*character building*) menuju pembangunan kembali jati diri bangsa yang bermoral religius. Dengan begitu, maka pengembangan pendidikan multikultural di lembaga pendidikan keagamaan (Islam) dalam hal ini akan memiliki ciri khususnya yaitu religiusitas atau multikulturalisme religius. Selain hal itu, maka dalam rangka membekali peserta didik tentang pengetahuan moral (*moral knowing*), maka dapat saja lingkungan di sekitar lembaga keagamaan juga dilibatkan dalam menumbuhkan rasa atau keinginan untuk berbuat baik yang kemudian menjadi sumber dari kecintaan untuk berbuat baik (*loving to good*). Lih. Sulalah, *Pendidikan.....*, hlm. 58-59.

dunia ini fakta ditemukannya keberagaman paham keagamaan, ideologi, dan keyakinan tidaklah dapat disembunyikan. Terhadap hal ini, dalam pendidikan Islam berbasis multikultural hal itu harus dipahami sebagai khazanah budaya dan modal sosial yang tidak mungkin wajib untuk diseragamkan.

Pada bangsa yang beragam yang terdiri dari berbagai macam agama dan aliran keagamaan, seperti diungkapkan oleh Suprayogo, masing-masing pengikut agama dan aliran keagamaan boleh-boleh saja mereka merasa benar, dan memang seharusnya demikian. Akan tetapi pada saat yang sama setiap dari mereka tidaklah dapat menganggap yang lainnya adalah sesat, karena tuduhan tersebut sejatinya dalam konteks beragama merupakan hak mutlak yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Posisi manusia adalah sama, yaitu masing-masing harus didudukkan sebagai hamba yang berjalan menuju keridlaannya. Siapa di antara mereka dan siapa pula yang gagal untuk mendapatkannya, tidak seorang pun yang tahu kecuali Tuhan sendiri. Saling menganggap bahwa yang lain salah, tertolak, dan bahkan sesat selain mengganggu perasaan dan mendatangkan kemarahan, hal ini juga akan mengganggu bangunan persatuan dan kesatuan, sementara bangunan persatuan itu sendiri mempersyaratkan adanya kesanggupan untuk menjaga dan memelihara hati serta perasaan dari pihak masing-masing yang berbeda. Kepercayaan dan keyakinan tidak boleh dipaksakan. Dalam Islam, selain perbedaan yang ada pada umat manusia adalah bagian daripada *sunnatullāh* yang tidak dapat dihindari, Nabi pun pada masa hidupnya dahulu dalam menyikapi perbedaan keyakinan umatnya juga tidak pernah memaksakannya. Nabi dalam konteks hidup bermasyarakat yang beragam dan menjaga persatuan dan kesatuan umat manusia lebih menyeru kepada penegakan keadilan.<sup>42</sup> Seruan demikian ini secara jelas dinyatakan Allah dalam berbagai ayat seperti halnya pada QS. al-Baqarah/2: 256 dan QS. asy-Syūrah: 15.

---

<sup>42</sup> Imam Suprayogo, *Masyarakat Tanpa Ranking: Membangun Bangsa Bersendi Agama*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 144-145.

## Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis Multikultural

Strategi sebagaimana dinyatakan oleh Pressley merupakan rencana kognitif yang diorientasikan pada keberhasilan tugas. Di dalamnya, strategi mencakup aktivitas seperti pemilihan dan penyusunan informasi, melatih materi yang akan dipelajari, menghubungkan materi baru dengan informasi dalam ingatan, dan memperkuat makna dari materi yang disampaikan. Strategi juga mencakup teknik pengembangan, penciptaan, dan mempertahankan iklim belajar positif –misalnya dapat dicontohkan, cara mengatasi kecemasan menghadapi ujian dan mengembangkan hasil positif pada harapan dan sikap.<sup>43</sup>

Penyampaian ilmu-ilmu agama Islam menurut Muhaimin dapat berpotensi untuk mengarahkan pada sikap toleran atau pun intoleran, berpotensi untuk mewujudkan integrasi atau disintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Fenomena tersebut dalam pengembangan pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam, menurutnya akan banyak ditentukan setidaknya oleh: *pertama*, pandangan teologi agama dan doktrin ajarannya; *kedua* sikap dan perilaku pemeluknya dalam memahami dan menghayati agamanya; *ketiga* lingkungan sosio-kultural yang mengelilinginya; dan *keempat* peranan dan pengaruh pemuka agama, termasuk guru agama dalam mengarahkan pengikutnya.<sup>44</sup>

Dengan merujuk pada rumusan Muhaimin seperti di atas, maka lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman dalam bidang teologi, akan dihadapkan di antara dua pilihan yang akan menentukan arah dan tujuan daripada outputnya dalam proses pendidikan yang diberlakukannya. Jika pandangan teologi yang dipegangi dan diajarkan bersifat ekstrim, dibarengi dengan model pemahaman dan penghayatan yang agama yang simbolik, tekstual, dan skriptual karena penjelasan-penjelasan materi yang disampaikan bersifat doktriner, *rigid* (kaku) dan mengembangkan sikap fanatisme buta yang di dalamnya juga didukung serta dengan lingkungan sosial-kultur yang eksklusif, maka bisa

43 Dale H. Schunk, *Learning.....*, hlm. 567.

44 Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), hlm. 287-288.

jadi akan melahirkan sikap intoleran. Dalam hal ini agama dapat berperan sebagai faktor yang *disintegratif* (pemecah belah) yang pada gilirannya ide multikultural yang diajarkan dalam pendidikan akan berubah menjadi mono-kultural.

Pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam –terutama dalam bidang studi al-Qur'an dan al-Hadits yang menjadi sumber pokok ajaran Islam– agar tidak melahirkan sikap *rigid*, namun sebaliknya dapat berfungsi sebagai faktor yang integratif di tengah beragamanya kultur yang ada, maka seharusnya ia tidak diarahkan kepada: 1) menumbuhkan semangat fanatisme buta; 2) menumbuhkan sikap intoleran di kalangan peserta didik dan masyarakat; 3) memperlemah kerukunan hidup beragama serta persatuan dan kesatuan umat. Pengembangan pembelajaran tersebut seyogianya mampu menciptakan *ukhuwah Islamiyah* dalam suasana multikultural, yaitu persaudaraan yang bersifat Islami, bukan sekedar persaudaraan antarumat Islam sebagaimana yang selama ini dipahami, tetapi juga mampu membangun persaudaraan antarsesama, serta mampu membentuk kesalehan pribadi sekaligus kesalehan sosial yang penuh dengan kesadaran akan penciptaannya di muka bumi dan keikhlasan di hadapan Tuhannya.<sup>45</sup> Dengan cita rasa Islam seperti disebutkan tersebut, maka dengan begitu akan tampaklah apa yang oleh al-Qur'an disebut bahwa kedatangan Islam itu sendiri merupakan manifestasi daripada *rahmatan li al-'ālamīn* seperti yang disebut dalam QS. al-Anbiyā': 107.

Pada kesempatan yang lain, jika pembelajaran agama Islam di atas dapat dikembangkan dan diterapkan di tengah-tengah kehidupan umat manusia, maka di situlah akan juga dilihat peran daripada manusia diciptakan di muka bumi, bahwa ia hanya diciptakan untuk semata-mata beribadah dan berbuat secara ikhlas atas semua ciptaan-Nya, seperti yang disinggung dalam QS. Al-Bayyinah/98: 5.

Secara teknis, pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam berbasis multikultural di era globalisasi seperti sekarang ini, menurut Muhaimin

---

45 Dalam istilah yang lain, pendidikan Islam berbasis Multikultural hendaknya mampu menciptakan tiga rasa persaudaraan; *pertama*, persaudaraan sesama agama (*al-ukhuwwah al-diniyyah*). *Kedua*, persaudaraan sesama warganegara (*al-ukhuwwah al-waṭāniyyah*). *Ketiga*, persaudaraan sesama manusia (*al-ukhuwwah al-insāniyyah*).

menuntut kepada seorang pendidik untuk mengubah paradigma atau *mindset* yang digunakan. Sistem pembelajaran demikian ini dikarenakan peserta didik bukan hanya diposisikan sebagai individu, tetapi ia merupakan warga lokal dan global. Sebagai individu, ia memiliki fitrah manusia, sehingga pembelajaran dalam hal ini berfungsi untuk mengembangkan potensi-potensi fitrahnya, serta menyelamatkan dan melindungi fitrahnya. Upaya pengembangan, penyelamatan, dan perlindungan terhadap potensi fitrah manusia tersebut diwujudkan dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student centered*) sebagai proses aktualisasi dirinya. Sebagai warga lokal dan global, peserta didik dan pembelajarannya dapat difasilitasi dengan berbagai sumber belajar yang bersifat lokal dan global, dukungan dan jaringan-jaringan kerja (*network*) yang digunakan untuk mengoptimalkan serta menjadi peluang dalam pengembangan diri mereka selama proses belajar.

Dalam hal kebebasan yang diberikan kepada para peserta didik terhadap pilihannya, tradisi pembelajaran seperti ini sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para ulama' ahli tasawuf, sehingga dalam *Hidāyah Al-azkiyā'* Zainuddin bin Ali pernah mengemukakan:<sup>46</sup>

Dan bagi masing-masing dari mereka ada jalan dari beberapa jalan yang dia pilih, sehingga dari jalan itu dia sampai (pada tujuannya) seperti duduknya mereka di antara manusia dalam keadaan mendidik, dan seperti mereka yang memperbanyak *wirid-wirid*, berpuasa dan shalat, dan seperti mereka yang *berkhidmat* kepada manusia dan membawa kayu bakar untuk bersedekah dengan uang yang dihasilkan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Hidāyah al-azkiyā'* adalah kitab tashawuf yang ditulis dalam bentuk nadlam oleh Zainuddin bin Ali Al-Malaibārī yang bermazhab fiqh Syafi'i. Kitab ini telah dijabarkan oleh Al-Sayyid Bakrī Al-Makkī dengan judul *Kifayah Al-Atqiyā' wa Minhāj Al-Aṣfiyā'*. Zainuddin bin Ali Al-Malaibārī sendiri adalah kakek dari Zainuddin bin Abdul Azīz Al-Syafi'i yang telah menulis kitab fiqh *Fath Al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-Ain*. Kitab *Fath Al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-Ain* ini, dijabarkan pula oleh Abu Bakr bin Sayyid Muhammad Syatṭā Al-Dimyāṭi menjadi 4 jilid dengan judul *Tānah Al-Ṭalibīn*. Dua kitab fiqh ini, sangat populer dikalangan mazhab Syafi'i terutama di pesantren-pesantren tradisional di Indonesia khususnya tanah Jawa.

<sup>47</sup> Al-Sayyid Bakrī Al-Makkī, *Kifayah Al-Atqiyā' wa Minhāj Al-Aṣfiyā'*, (Semarang: Thaha Putra, t.t.), hlm. 13.

Sebagai implikasi dari prinsip pembelajaran ini, maka proses belajar mengajar sesungguhnya lebih menekankan pada proses pembelajaran, dan bukan pada proses mengajar. Prinsip pembelajaran dengan lebih mendasarkan pada pandangan bahwa manusia dilahirkan dengan potensi bawaan tertentu yang dengan itu ia mampu berkembang secara aktif dengan lingkungannya tersebut sejalan dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari pada hadits yang ke-1296:

Setiap yang dilahirkan adalah dalam keadaan *fithrah*. Kemudian orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nashrani, atau Majusi seperti halnya binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya.<sup>48</sup>

Dalam praktiknya, strategi pembelajaran dalam pendidikan Islam multikultural terutama dalam bidang al-Qur'an dan al-Hadits dapat dilakukan dengan melalui pembelajaran berbasis kontekstual dan berbasis riset. Pembelajaran al-Qur'an dan al-Hadits pada dasarnya merupakan upaya normatif untuk membantu seseorang atau sekelompok peserta didik dalam mengembangkan pandangan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kedua sumber pokok tersebut, sehingga ia akan menjadi sikap hidup yang termanifestasikan dalam ketrampilan hidup sehari-hari. Selanjutnya untuk mengembangkan pandangan hidup itu, diperlukan strategi pembelajaran kontekstual yaitu pembelajaran yang selalu mengaitkannya dengan konteks dan pengalaman-pengalaman hidup peserta didik yang beraneka ragam dan konteks masalah-masalah serta situasi-situasi riil dari kehidupannya. Dengan melalui kerjasama, *sharing* dengan teman dan saling menunjang satu dengan yang lainnya dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menginterpretasi terhadap pengetahuan dan pengalaman hidupnya tersebut, maka peserta didik akan dapat mengkonstruksi makna dan nilai-nilai Islam yang perlu diinternalisasikan dalam diri mereka.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad bin Ismā'il Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (t.tp., mawqī' al-Islām, t.t.), J. V., hlm. 182.

<sup>49</sup> Menurut Muhaimin, bahwa prinsip dasar dan pokok ajaran agama secara ontologis, dan aksiologis akan tetap seperti itu adanya. Namun demikian, secara epistemologis hal itu akan bergerak sesuai dengan bentuk tantangan yang dihadapi. Pembelajaran al-Qur'an dan al-Hadits berbasis kontekstual termasuk dalam wilayah

## Penutup

Pendidikan multikultural sebagai upaya dalam menyikapi keberagaman kultur yang terdapat pada masyarakat majemuk seperti halnya di Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan hakikat daripada tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu memanusiakan manusia dengan jalan menata masyarakat-bangsa yang plural-majemuk, yang hidup dalam sekat-sekat budaya sendiri-sendiri menjadi masyarakat yang multikulturalistik, stabil, dan dinamis tanpa adanya budaya yang berpotensi mendominasi, mentirani budaya lain, dan sehingga dalam keberagaman tersebut akan terbangun budaya saling bekerja sama dalam mewujudkan kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan secara bersama-sama.

Islam sebagai sistem nilai universal dapat dijadikan sebagai paradigma politik dalam pendidikan multikultural, yaitu dengan jalan membalik paradigma atau orientasinya yang *eksklusif* menjadi *inklusif*, yang tadinya masih bersifat doktriner, dogmatis, dan tidak berwawasan multikultural, diubah orientasi, pendekatan, metodologinya, agar menjadi pendidikan yang *inklusif*. Pendidikan yang inklusif dalam pendidikan Islam berbasis multikultural selanjutnya dapat membawa kepada sikap toleran, sikap menghormati perbedaan paham, ideologi, dan aliran keagamaan. Perbedaan-perbedaan tersebut selanjutnya dipahami sebagai khazanah budaya dan modal sosial yang tidak mungkin wajib untuk diseragamkan.

Strategi pembelajaran agama Islam pada masyarakat multikultural secara teknis dalam prosesnya menuntut kepada pendidik untuk mengubah paradigma atau *mindset* yang digunakan. Dalam praktiknya, agar tidak melahirkan sikap *rigid* dan sebaliknya dapat berfungsi sebagai faktor yang integratif di tengah beragamnya kultur yang ada, maka strategi pendidikan Islam multikultural seharusnya tidak diarahkan kepada: 1) menumbuhkan semangat fanatisme buta; 2) menumbuhkan sikap intoleran di kalangan peserta didik dan masyarakat; 3) memperlemah kerukunan hidup beragama serta persatuan dan kesatuan umat.

---

epistemologis, yang sehingga titik tekannya terletak pada bagaimana proses, prosedur, dan metodologi yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan yang luas tentang ajaran dan nilai-nilai yang terkandung, hingga akhirnya hal itu dapat dihayati dan diamalkannya. Lih. Muhaimin, *Rekonstruksi.....*, hlm. 292-293.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*, Jakarta: PSAP, 2005.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'il, *Ṣahīh al-Bukhārī*, t.tp., mawqī' al-Islām, t.t.
- Al-Makkī, Al-Sayyid Bakrī, *Kifayah Al-Atqiyā' wa Minhāj Al-Aṣfiyā'*, Semarang: Karya Thaha Putra, t.t.
- Al-Nawawī, Muhyiddīn Abu Zakariyā Yahya, *Riyādlus Ṣālihīn*, Solo: Insan Kamil, 2013.
- Azra, Azyumardi, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, Yogyakarta: Impulse, 2007.
- Bagir, Zainal Abidin, dkk., *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008*, Yogyakarta: CRCS-UGM, 2008.
- Baidhawiy, Zakiyuddin, *Studi Islam: Pendekatan dan Metode*, Yogyakarta: Insan Madani, 2011.
- Banks, James, *Multicultural Education: Issues and Perspectives*, London: Allyn and Bacon Press, 1989.
- Freire, Paulo, *Pedagogy of the Oppressed*, terj. Utomo Danandjaya, Jakarta: LP3ES, 2013.
- Hasan, Fuad, *Psikologi-Kita & Eksistensialisme: Pengantar Filsafat Barat, Berkenalan dengan Eksistensialisme, Kita dan Kami*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2014.
- Hefner, Robert W., *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapura, and Indonesia*, terj. Bernardus Hidayat, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Huntington, Samuel. P., *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, terj. M. Sadat Ismail, Yogyakarta: Qalam, 2010.
- Izutsu, Toshihiko, *The Concept of Belief in Islamic Theology: Asemantical Analysis of Imān and Islām*, terj. Agus Fahri Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Mahfud, Choirul, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

- Maksum, Ali, *Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. Malang: Aditya Media, 2011.
- Molang, Benyamin, *Multikulturalisme: Cerdas Membangun hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis*, Jakarta: Indeks, 2015.
- Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Muhammad Iqbal Ahnaf, dkk., *Politik Lokal dan Konflik Keagamaan; Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik dalam Konflik Keagamaan di Sampang, Bekasi, dan Kupang*, Yogyakarta: CRCS-UGM, 2015.
- Nata, Abuddin, *Sosiologi Pendidikan Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Parekh, Bikhu, *Rethinking Multiculturalism: Keragaman Budaya dan Teori Politik*, Yogyakarta: Impulse, 2008.
- Purwasito, Andrik, *Komunikasi Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2013*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014.
- Qomar, Mujamil, *Fajar Baru Islam Indonesia?: Kajian Komprehensif atas Arah Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara*, Bandung: Mizan, 2012.
- Salmiwati, *Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam Pengembangan Nilai-Nilai Multikultural*, Jurnal Al-Ta lim Vol. 20, No. 1, 2013.
- Schunk, Dale H., *Learning Theoris: An Educational Perspective*, terj. Eva Hamdiah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sihotang, Kasdin, *Pendidikan Multikultural: Membangun Karakter Inklusif-Kritis*, dalam *Multikulturalisme: Cerdas Membangun hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis*, Jakarta: Indeks, 2015.
- Sulalah, *Pendidikan Multikultural: Didaktika Nilai-Nilai Universalitas Kebangsaan*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Suprayogo, Imam, *Masyarakat Tanpa Ranking: Membangun Bangsa Bersendi Agama*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.

Samsul Munir: Politik Pendidikan Islam Berbasis Multikultural | 181-182

\_\_\_\_\_, *Paradigma Pengembangan Keilmuan di Perguruan Tinggi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

\_\_\_\_\_, *Spirit Islam: Menuju Perubahan & Kemajuan*, Malang: UIN-Maliki Press, 2012.

Tafsir, Achmad, *Filsafat Umum*, Bandung: Remaja Rosadakarya, 2002.

Tobroni, *Pendidikan Islam: Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualitas*, Malang: UMM Press, 2008.

Yaya Suryana dan H. A. Rusdiana, *Pendidikan Multikultural: Suatu Upaya penguatan Jati Diri Bangsa*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

